



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAHDI
2. Jabatan : KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3. NHK : 221539

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.367.776.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/112 m2 di KAB / KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 152.776.000
2. Tanah Seluas 525 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. Tanah Seluas 450 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 414 m2/180 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 444 m2/420 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **311.800.000**

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.800.000
3. MOBIL, HONDA BRIO RS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **32.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	16.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.728.076.000
III. HUTANG	Rp.	123.920.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.604.156.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.